

BPBD Bombana Pantau Dampak Kekeringan di Lantari Jaya dan Rarowatu Utara

Bombana, sultranet.com — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bombana meninjau sejumlah wilayah terdampak kekeringan di Kecamatan Lantari Jaya dan Kecamatan Rarowatu Utara, Senin (17/8/2026). Pemantauan yang dipimpin Kepala BPBD Bombana, Drs. Hasdin Ratta, M.Si., tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas kondisi kekeringan yang melanda kedua kecamatan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan masyarakat untuk menentukan langkah penanganan yang sesuai.

Peninjauan lapangan itu merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bombana dalam merespons dampak kekeringan melalui koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Bupati Bombana telah menginstruksikan sejumlah instansi terkait untuk turun langsung memantau kondisi di lapangan, melakukan peninjauan, serta mengambil langkah penanganan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Sejumlah instansi yang dilibatkan dalam upaya tersebut meliputi BPBD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pertanian, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta unsur Bhabinkamtibmas.

Keterlibatan berbagai instansi tersebut diperlukan agar penanganan kekeringan dapat dilakukan secara terkoordinasi. Setiap perangkat daerah memiliki kewenangan dan peran berbeda yang dapat disinergikan untuk memahami persoalan di lapangan, mengidentifikasi kebutuhan warga, serta merumuskan langkah penanganan berdasarkan kondisi yang ditemukan.

Kepala BPBD Bombana, Hasdin Ratta, mengatakan penanganan kekeringan di Kecamatan Lantari Jaya dan Kecamatan Rarowatu Utara tidak dapat dibebankan kepada satu instansi saja. Menurut dia, kerja sama seluruh pihak terkait diperlukan untuk mencari solusi yang sesuai dengan kondisi wilayah terdampak.

“Bencana kekeringan yang melanda Kecamatan Lantari Jaya dan Rarowatu Utara merupakan tanggung jawab bersama instansi terkait yang ada di Kabupaten

Bombana. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dan sinergi dalam penanganannya serta mencari solusi terbaik terhadap bencana yang telah terjadi,” jelas Hasdin.

Ia menjelaskan, pemantauan langsung menjadi langkah penting untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi masyarakat yang terdampak kekeringan. Informasi yang dihimpun di lapangan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebutuhan prioritas dan bentuk penanganan yang diperlukan.

Menurut Hasdin, penanganan bencana perlu didasarkan pada kondisi faktual agar langkah yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, koordinasi antara BPBD dan perangkat daerah terkait menjadi bagian penting dalam proses pemantauan maupun penyusunan langkah tindak lanjut.

Kekeringan dapat menimbulkan persoalan yang melampaui berkurangnya ketersediaan air. Dalam kondisi tertentu, dampaknya juga dapat dirasakan pada pemenuhan kebutuhan rumah tangga, aktivitas sehari-hari, dan kegiatan pertanian yang bergantung pada ketersediaan air.

Bagi masyarakat di wilayah terdampak, ketersediaan air menjadi salah satu kebutuhan penting untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Sementara bagi sektor pertanian, kondisi kekeringan berpotensi mengganggu kegiatan usaha tani apabila kebutuhan air tanaman tidak terpenuhi. Oleh sebab itu, informasi mengenai kondisi lapangan diperlukan agar penanganan dapat mempertimbangkan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Dalam upaya merespons kondisi tersebut, keterlibatan Dinas PUPR dan Dinas Pertanian menjadi bagian dari koordinasi lintas sektor yang dilakukan pemerintah daerah. Sementara BPBD berperan dalam koordinasi penanganan kebencanaan sesuai kewenangannya. Dukungan instansi lain juga diperlukan untuk membantu kelancaran komunikasi dan pelaksanaan langkah penanganan di wilayah terdampak.

Meski demikian, bentuk penanganan yang diperlukan perlu disesuaikan dengan hasil pemantauan serta kebutuhan aktual di lapangan. Pendataan yang memadai dapat membantu pemerintah menentukan prioritas, terutama apabila terdapat perbedaan kondisi dan tingkat dampak kekeringan antara satu wilayah dan wilayah lainnya.

Pemantauan langsung juga memberi kesempatan kepada instansi terkait untuk memperoleh informasi yang lebih akurat dibandingkan hanya mengandalkan laporan administratif. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar koordinasi lanjutan, termasuk dalam menentukan kebutuhan dukungan teknis dan langkah yang memungkinkan dilakukan berdasarkan kewenangan masing-masing instansi.

Pemerintah Kabupaten Bombana melalui BPBD bersama perangkat daerah terkait berupaya memastikan persoalan kekeringan tetap menjadi perhatian. Koordinasi lintas sektor diharapkan membantu mempercepat identifikasi masalah dan menyelaraskan langkah penanganan agar lebih terarah serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam penanganan bencana, komunikasi yang baik antarlembaga menjadi unsur penting untuk menghindari tumpang tindih tugas dan memastikan informasi mengenai kondisi lapangan dapat ditindaklanjuti. Kerja sama tersebut juga dibutuhkan agar perkembangan situasi di wilayah terdampak dapat dipantau dan menjadi dasar penyesuaian langkah apabila kondisi berubah.

Selain penanganan dalam jangka pendek, informasi dari lapangan dapat membantu pemerintah daerah memahami persoalan kekeringan secara lebih menyeluruh. Pemahaman tersebut penting untuk mempertimbangkan langkah lanjutan sesuai kebutuhan wilayah, termasuk dalam upaya mengurangi risiko dampak serupa apabila kondisi kekeringan kembali terjadi.

BPBD Bombana bersama instansi terkait akan terus memantau perkembangan kondisi di Kecamatan Lantari Jaya dan Kecamatan Rarowatu Utara. Pemerintah daerah juga berupaya mencari solusi berdasarkan hasil pemantauan dan koordinasi agar masyarakat yang terdampak memperoleh perhatian sesuai kebutuhan.

Melalui pemantauan dan kerja sama lintas sektor tersebut, penanganan kekeringan di Kabupaten Bombana diharapkan dapat berjalan lebih terarah, terkoordinasi, dan tepat sasaran. Upaya ini menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk merespons kondisi kebencanaan serta memperhatikan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.